

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Komang Indra Apsaridewi (2023) saat ini sektor perbankan berdiri sebagai suatu perusahaan penting dan terlibat dalam pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa kita. Lembaga keuangan ini, yang biasa disebut sebagai Bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penerima simpanan moneter dari masyarakat umum dalam bentuk rekening giro, serta rekening tabungan dan simpanan. kemudian, dana ini dialokasikan kembali ke masyarakat melalui pemberian kredit dalam bentuk pinjaman. Karena sebagian dari dana yang diterima dari masyarakat akan dialokasikan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, baik kepada individu maupun perusahaan, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka atau untuk mendukung pertumbuhan dan perluasan usaha mereka.

Menurut Syaifuddin (2017), perbankan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara mengadakan pengumpulan suatu dana melalui usaha-usaha yang dijalankan perbankan. Bank dapat diartikan sebagai lembaga yang memediasi antara pihak surplus dana dengan defisit dana. Pihak surplus dana adalah masyarakat yang mengalami kekurangan dan yang dapat dipenuhi dengan cara meminjam di bank dalam bentuk kredit (*loan*).

Menurut Budisantoso (2019), lembaga keuangan salah satunya yang mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat adalah bank. Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat sebagai financial intermediary. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 atas Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan. “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam

bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Proses kegiatan bank diawasi langsung oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral.

Menurut Zaharman (2017), praktik perbankan di Indonesia tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk Bank Umum, ataupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masing-masing bentuk lembaga bank tersebut berbeda karakteristik dan fungsinya. Fungsi BPR diantaranya adalah memberikan layanan perdanaan seperti bank kepada masyarakat yang sulit menjangkau bank umum dan sebagai sarana yang dapat membantu masyarakat memahami pola nasional agar pemerataan pembangunan disektor pedesaan lebih cepat, sedangkan tujuan BPR antara lain menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rofily Putriyandari (2019), salah satu produk utama perbankan adalah penyaluran kredit, yang menjadi sumber pendapatan utama bagi bank termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya dan saat ini dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dan menerima giro. Masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana dalam rangka membiayai suatu usaha dan kebutuhan rumah tangga, dapat menggunakan pinjaman kredit. Perkreditan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan BPR. Kegiatan perkreditan harus dikelola baik agar kualitas kredit dapat membentuk salah satu bagian dari aktiva produktif bank yang akan memengaruhi keadaan likuiditas bank serta berdampak kepada keadaan perekonomian nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pengertian kredit sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terutama dalam bidang perekonomian merupakan bagian yang sangat penting. Semua aktivitas kredit yang dilakukan BPR mempunyai peranan yang sangat besar untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dana yang mendesak maupun dijadikan sebagai modal usaha bagi masyarakat. Kredit juga merupakan sumber pendapatan utama bagi bank guna kesinambungan usahanya, sehingga bank harus senantiasa menjaga kualitas kreditnya. Dalam pemberian kredit, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat agar kualitas kredit yang diberikan senantiasa lancar. Apabila bank tidak mampu menjaga kualitas kreditnya dengan baik maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerja bank khususnya kinerja keuangan yang dapat mengakibatkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah penyimpan menjadi terganggu.

Pemberian yang tidak memperhatikan kebijaksanaan dan prosedur yang ada akan mengundang timbulnya penyimpangan-penyimpangan. Semakin jauh pemberian kredit dari pedoman yang telah disusun maka akan semakin besar presentase kredit macet. Salah satu hal yang paling penting dalam pemberian kredit yaitu dengan melakukan deteksi atas kredit yang diduga akan bermasalah, sehingga kredit tersebut dapat diselamatkan dan terhindar dari kemacetan. Untuk itu perlu adanya prosedur dalam pemberian kredit yang akurat dan pemenuhan persyaratan yang layak yang dilakukan oleh pihak bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat.

PT BPR Solider memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah melalui penyaluran kredit kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada masyarakat umum. Namun demikian, proses pemberian kredit memerlukan pertimbangan yang matang agar dapat meminimalkan risiko kredit macet yang dapat mempengaruhi kesehatan bank yang berpotensi menurunkan kualitas aset dan mengganggu stabilitas keuangan bank. Oleh karena itu, proses penilaian kelayakan kredit menjadi hal krusial yang memerlukan ketelitian dan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Salah satu mekanisme pengendalian risiko kredit di BPR adalah komite kredit, yaitu tim yang bertugas mengevaluasi setiap pengajuan kredit yang telah dianalisis oleh bagian kredit, kemudian memutuskan apakah kredit tersebut layak dicairkan atau tidak. Proses pengambilan keputusan pemberian kredit di PT BPR Solider Pancur Batu yang dilakukan oleh Komite Kredit melalui beberapa tahapan analisis. Proses ini melibatkan berbagai pertimbangan mulai dari kelayakan debitur, prospek usaha, hingga kondisi ekonomi secara makro. Meskipun telah memiliki prosedur yang jelas, terkadang masih ditemukan kredit bermasalah yang menunjukkan perlunya analisis mendalam terhadap efektivitas proses pengambilan keputusan tersebut. Proses ini biasanya melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek calon debitur, seperti karakter (*character*), kapasitas membayar (*capacity*), jaminan (*collateral*), dan kondisi ekonomi (*condition*), atau dikenal dengan prinsip 5C. Keputusan yang diambil oleh komite kredit memiliki dampak langsung terhadap kualitas portofolio kredit bank.

PT BPR Solider Pancur Batu sebagai salah satu cabang BPR, dimana PT BPR Solider berpusat di Marelau dan memiliki dua kantor cabang yaitu PT BPR Solider Pancur Batu dimana kantor kasnya terletak di Lubuk Pakam dan PT BPR Solider Pematang Siantar yang turut berupaya menjaga kualitas kreditnya melalui peran aktif Komite Kredit. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang kerap muncul, seperti keterbatasan data calon debitur, perbedaan pandangan antar anggota komite dalam menilai risiko, tekanan target penyaluran kredit, hingga perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi prospek usaha debitur. Situasi ini membuat pengambilan keputusan tidak selalu bersifat *straightforward* dan memerlukan pertimbangan mendalam.

PT BPR Solider Pancur Batu salah satu lembaga keuangan di Kabupaten Deli Serdang juga memiliki mekanisme Komite Kredit dalam menentukan kelayakan pencairan kredit. Menariknya, dalam proses pengambilan keputusan, setiap anggota komite memiliki peran dan pertimbangan masing-masing, yang kemudian dirangkum menjadi satu keputusan kolektif. Meskipun demikian, dalam praktiknya, proses pengambilan keputusan Komite Kredit dalam menentukan

kelayakan pencairan kredit seringkali menghadapi berbagai tantangan. Komite Kredit tidak hanya menilai dokumen administratif, tetapi juga harus memastikan validitas informasi mengenai kondisi usaha, kemampuan membayar, serta jaminan yang diberikan debitur. Pada tahap diskusi dan musyawarah, sering muncul perbedaan pandangan antaranggota komite terkait kelayakan calon debitur, yang dapat memengaruhi kecepatan dan ketegasan keputusan. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi, kebijakan perbankan, serta persaingan antarbank juga turut memengaruhi pertimbangan komite dalam menilai risiko dan manfaat dari keputusan kredit yang akan diambil. Dengan demikian, kualitas keputusan yang dihasilkan Komite Kredit sangat bergantung pada ketelitian analisis, objektivitas diskusi, dan kehati-hatian dalam menafsirkan data sebelum menetapkan apakah kredit layak dicairkan atau ditolak.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut berlangsung dan memberikan gambaran jelas tentang mekanisme pengambilan keputusan pemberian kredit. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan kredit dan meminimalkan risiko kredit bermasalah. Melihat pentingnya keputusan yang diambil oleh Komite Kredit terhadap pencairan kredit maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Proses Pengambilan Keputusan Komite Kredit dalam Menentukan Pencairan Kredit di PT BPR Solider Pancur Batu"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Proses pengambilan keputusan Komite kredit belum sepenuhnya optimal sehingga masih ditemukan kredit bermasalah
2. Keterbatasan informasi dan perbedaan persepsi antar anggota komite memengaruhi kualitas Keputusan

3. Jenis kelayakan nasabah di PT BPR Solider Pancur Batu

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini untuk menghindari kesalah pahaman dan perluasan masalah, maka perlu adanya batasan masalah. Maka penelitian ini memfokuskan pada analisis pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan pencairan kredit.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana proses pengambilan keputusan komite di PT BPR Solide Pancur Batu dalam menentukan kelayakan pencairan kredit.

1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan Komite Kredit di PT BPR Solider Pancur Batu dalam menentukan kelayakan pencairan kredit.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu manajemen keuangan dan perbankan, khususnya dalam topik manajemen resiko kredit dan pengambilan keputusan dalam lembaga keuangan mikro. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa, baik dalam konteks BPR maupun perbankan umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi PT BPR Solider Pancur Batu penelitian ini dapat menjadi masukan untuk memperbaiki prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan kredit sehingga risiko kredit bermasalah dapat ditekan.
- b. Bagi praktisi perbankan memberikan gambaran empiris tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses evaluasi kredit yang dapat diadaptasi di lembaga keuangan lain.
- c. Bagi masyarakat dan calon debitur memberikan pemahaman mengenai aspek-aspek yang dinilai oleh bank dalam menentukan kelayakan kredit, sehingga dapat mempersiapkan diri sebelum mengajukan pembiayaan.

